

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi, dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, untuk menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:

a. Aspek Struktural

Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.

b. Aspek Instrumental

Mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi, dan iptek.

c. Aspek Kultural

Muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem

rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.

(Sumber : www.polri.go.id)

Visi

Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri

sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat

- f. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polri kedepan.
- g. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- h. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

(Sumber : www.polri.go.id)

Gambar 1.1

Logo Kepolisian Republik Indonesia



Sumber : www.polri.go.id

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dinamika yang cepat dalam relasi media massa dengan Polri sangat terasa dalam beberapa kurun waktu enam bulan terakhir ini. Ada sebuah masa dimana Polri dan media massa mengalami periode harmonis atau bisa disebut masa “bulan madu” antara mereka. Hal ini terkait dengan tindakan tegas Polri dalam kasus penembakan terkait sengketa lahan PTPN Kabupaten Ogan Ilir yang menyeret enam perwira tinggi polisi, keberhasilan meringkus teroris di Solo, perbaikan pelayanan Polri dengan *call center* terbaru 110, kebijakan tentang polisi gemuk, dan berbagai hal positif lainnya. Hal ini berdampak kepada pembentukan opini di masyarakat mengenai citra Polri itu sendiri.

Namun demikian, seiring dengan berbagai pemberitaan mengenai keberhasilan Polri tersebut, terdapat pula pemberitaan lewat media massa yang agak kurang berpihak kepada Polri. Adanya dugaan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Polri dalam menangani berbagai permasalahan di tanah air semakin menemukan momentumnya ketika beberapa permasalahan diangkat oleh beberapa kalangan ke media massa. Hal ini terkait dengan kasus korupsi simulator SIM, perseteruan antara Polri vs KPK, tindakan oknum Polri yang mematahkan spion mobil, pembelian kuda serta anjing pelacak yang menelan biaya cukup besar, dan berbagai fenomena lainnya di tanah air silih berganti.

Seiring dengan peningkatan teknologi maka dalam hal ini media massa menjadi sarana dalam memberikan informasi, serta melaksanakan komunikasi dan dialog. Secara tidak langsung, dengan makna keberadaan media itu sendiri, maka media menjadi sarana dalam upaya perluasan ide-ide, gagasan-gagasan dan pemikiran terhadap kenyataan sosial. Begitu kuatnya dampak yang ditimbulkan, keberadaan media massa dapat dijadikan “mata kedua” bagi masyarakat dalam melihat peristiwa yang terjadi melalui berita-berita

yang disajikan oleh media massa itu sendiri. Sehingga efek timbulnya opini publik tentunya berkat pemberitaan dari suatu media tersebut, apakah berita yang disampaikan nantinya dapat menimbulkan suatu pandangan atau pencitraan dari masyarakat dalam menyikapi suatu peristiwa yang diberitakan.

Berita atau informasi tersebut bisa didapatkan oleh masyarakat melalui berbagai media, seperti media cetak maupun elektronik. Namun di era informasi dan digital saat ini, format berita dan informasi dapat ditemukan dalam bentuk berita *online*. Berita *online* dapat dinikmati secara singkat dan cepat. Penggunaanya pun tidak perlu khawatir akan ketinggalan berita karena berita *online* umumnya menyajikan informasi yang selalu *up to date* dan juga cepat.

Perkembangan berita *online* berjalan seiring dengan pertumbuhan pengguna internet. Hal ini dikarenakan untuk mengakses sebuah berita *online*, dibutuhkan jaringan internet. Sehingga pengguna internet dapat mengakses situs-situs berita dengan mudah dan cepat.

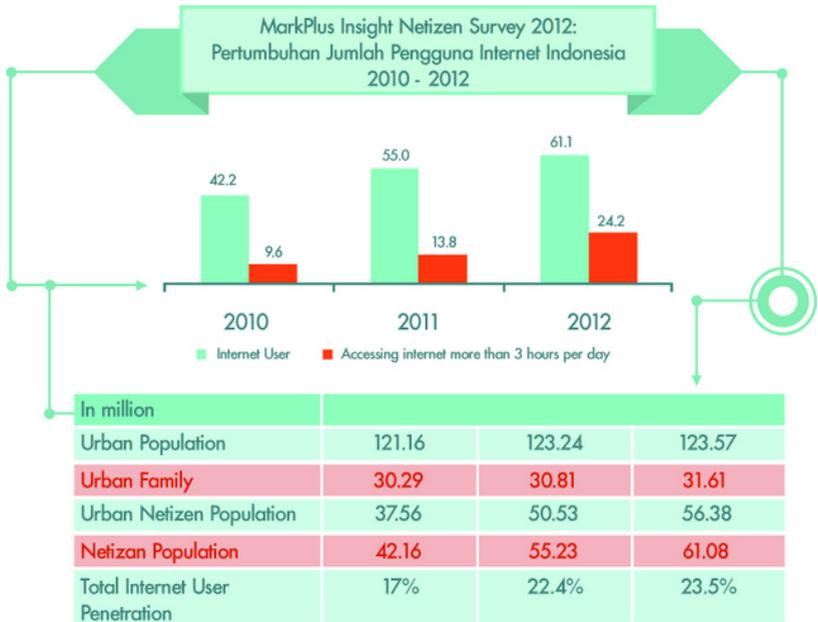
Sebuah survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau 24,23 persen dari total populasi negara ini. Tahun depan, angka itu diprediksi naik sekitar 30 persen menjadi 82 juta pengguna dan terus tumbuh menjadi 107 juta pada 2014 dan 139 juta atau 50 persen total populasi pada 2015.

(Sumber : www.tekno.kompas.com)

Sedangkan menurut data yang dirilis Markplus Insight, jumlah pengguna internet di Indonesia per akhir tahun 2012 mencapai 61,08 juta orang. Sebuah angka yang menunjukkan perkembangan hingga 6 juta orang dari pengguna internet tahun 2011 yang berjumlah 55 juta orang.

Gambar 1.2

Pertumbuhan Jumlah Pengguna Internet di Indonesia



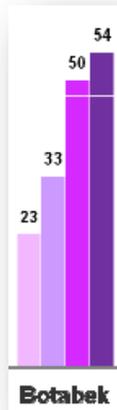
Sumber : www.gadgetan.com

Melalui grafik tersebut dapat diketahui penetrasi pengguna internet mencapai 23,5% dari jumlah populasi Indonesia. Metode yang digunakan oleh MarkPlus Insight adalah melakukan survei terhadap 2151 orang yang berusia 15-64 tahun dengan strata sosial ABC dan bertempat tinggal di 11 kota besar di Indonesia.

Berdasarkan perkembangan jumlah pengguna internet tersebut, maka penelitian ini berfokus pada pengguna internet, yaitu *audience* media berita *online*. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Bogor. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna internet di Kota Bogor mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun, selain itu Kota Bogor juga melakukan pengembangan sebagai *cyber city* di Indonesia dengan melaksanakan pembangunan *cyber park* yang difasilitasi dengan akses internet gratis. (Sumber : www.kotabogor.go.id)

Gambar 1.3
Grafik Pertumbuhan Pengguna Internet di Bogor, Tangerang, dan Bekasi
2009-2012



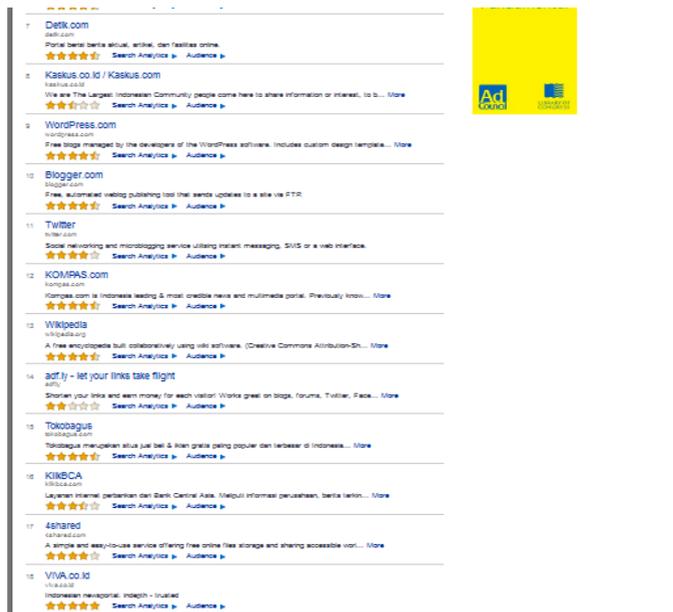
Sumber : Yahoo!-TNS Net Index - Indonesia

Seiring dengan kemajuan tersebut, teknologi internet menjadi basis penting dalam pemanfaatan berita *online* yang sekarang sudah semakin berkembang pesat. Kehidupan dan tuntutan akan akses yang lebih cepat membuat bermunculan berbagai situs berita *online*. Berbeda dengan berita versi cetak yang biasanya *update* setiap hari, minggu, bahkan ada yang setiap bulan. Peristiwa di seluruh dunia yang bisa terjadi setiap saat, tentunya merubah pola sumber berita tersebut dari yang setiap hari menjadi kapan saja

bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Maka situs berita *online* menjadi tujuan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini.

Di dalam penelitian ini diambil tiga situs berita *online*, yaitu Detik.com, Kompas.com, dan Viva.co.id. Hal ini berdasarkan hasil rating Alexa.com, situs pemeringkat *website* dunia yang dimiliki Amazon.com, salah satu situs terpopuler dunia. Alexa.com membuat daftar *website* terpopuler dengan membaginya berdasarkan kategori global dan peringkat di setiap negara. Berdasarkan rating tersebut, ketiga situs berita *online* tersebut merupakan situs berita yang paling banyak diakses.

Gambar 1.4
Rating Situs Berita *Online*



Sumber : www.alexa.com

Berkaitan dengan berbagai berita yang disampaikan oleh situs berita *online*, Detik.com pada 25 Januari 2012 menyampaikan berita mengenai rencana Polri tentang pembelian ratusan satwa yang mengalokasikan dana sebesar Rp 16 miliar. Polri menilai rencana pembelian itu sudah sesuai perhitungan guna operasional kerja. Namun disisi lain rencana tersebut mendapat kritik negatif dari masyarakat. (*Sumber* : news.detik.com)

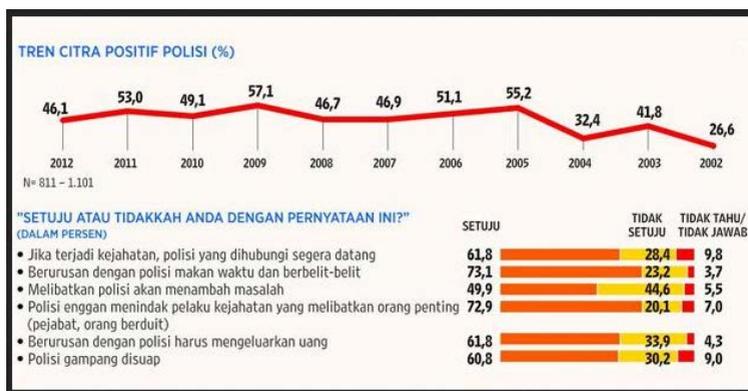
Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2013, Viva.co.id memberitakan bahwa Polri berhasil menangkap pelaku penjualan gadis asal Ukraina. Hal ini tentu saja merupakan sebuah prestasi bagi Polri. (*Sumber* : www.metro.news.viva.co.id)

Indonesia secara normatif konstitusional adalah negara hukum. Dalam negara hukum Indonesia, Polri merupakan pilar yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Polri berfungsi menjamin keamanan serta ketertiban dalam negeri, melayani dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Polri diberikan kewenangan dan fasilitas yang diperlukannya. Namun sangat disayangkan, ditengah kewenangannya tersebut, saat ini Polri memiliki citra yang buruk dimata masyarakat dan dianggap tidak berintegritas, tidak profesional bahkan menjadi satpam swasta.

Selama satu dasawarsa, penilaian publik terhadap citra positif Kepolisian terus berubah. Jajak pendapat Kompas merekam penilaian terburuk terhadap citra Polri diberikan publik pada masa-masa awal kemandirian Polri. Saat itu hanya 26,6 persen responden yang memberi penilaian positif terhadap citra Polri. Tahun 2009, proporsi publik yang menilai positif meningkat dan mencapai titik tertinggi. Ketika itu 57,1 persen responden menyatakan citra Polri positif. Berbagai prestasi diukir terutama perannya dalam mengungkap kasus terorisme.

Tahun ini, ketika usia Polri mencapai 66 tahun dan saat pengungkapan kasus terorisme juga mulai berkurang, penilaian terhadap citra positif Polri semakin turun. Hanya 46,1 persen responden jajak pendapat Kompas memberi nilai positif terhadap citra Polri. Proporsi yang lebih besar, yakni 49,3 persen, menyatakan citra Polri buruk. Mereka menilai, tubuh Polri telah dikotori oleh sikap dan perilaku aparat Polri yang mengingkari pedoman dasar pelaksanaan profesi Polri yang tercantum di dalam Tribrata Polri. (Sumber : www.aceh.tribunnews.com)

Gambar 1.5
Grafik Citra Polri



Sumber : www.assets.kompas.com

Namun di sisi lain, dalam survei kinerja Polri yang dilakukan The Institute of Indonesia Development Monitoring, masyarakat masih menilai positif kinerja Polri selama ini. Baik itu peran polisi sebagai penegak hukum, sebagai pengayom masyarakat dan menjalankan perannya sebagai pelindung masyarakat dengan baik. Terungkap sebanyak 78,6 persen responden mempersepsikan peran polisi sebagai penegak hukum telah dijalankan dengan baik. Dan hanya 23,4 persen responden saja mempersepsikan hal sebaliknya.

Selain itu, terekam juga dalam survei tersebut bahwa responden yang mempersepsi dan memberikan opini polisi telah menjalankan perannya sebagai pengayom masyarakat sebanyak 79,6 persen. Sedangkan 20,4 persen menilai polisi tidak menjadi pengayom yang baik.

Juga terungkap, sebanyak 70,8 persen responden mempersepsi peran polisi sebagai pelindung masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Dan sebesar 29,2 persen, menilai polisi tidak menjalankan perannya sebagai pelindung masyarakat dengan baik.

Survei rata-rata 80 persen menemukan masyarakat puas dengan tindakan pertama dan cepat polisi dalam membantu masyarakat seperti bencana alam, bencana kebakaran, pemembrantasan narkoba, serta didapatkan fakta bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 88 persen mempersepsikan bahwa polisi telah memberikan teladan taat hukum yang baik. 12 persen sisanya sebaliknya.

Sebanyak 83,1 persen opini masyarakat merasa puas terhadap pembinaan dan pendisiplinan oleh Polri jika didapati anggotanya melanggar hukum dan aturan serta jika masyarakat melaporkan tentang polisi yang melanggar aturan pada kepolisian. Sedangkan 16,9 persen masyarakat tidak puas dengan Polri terhadap pembinaan dan pendisiplinan yang dilakukan Polri.

Dari temuan survey juga terungkap, 73,2 persen masyarakat menginginkan Polisi lebih berperan aktif dalam memberantas korupsi yang makin merajalela. (Sumber : www.id.berita.yahoo.com)

Berbicara tentang opini publik terhadap Polri apakah positif atau negatif, tentunya tidak hanya tergantung kepada bagaimana Polri dalam pelaksanaan tugasnya selalu profesional dan sesuai harapan publik, akan tetapi juga tergantung pada bagaimana publik menerima informasi tentang apa yang telah dilakukan Polri dan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Disisi lain, opini publik yang positif sangat diperlukan

institusi Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, hal ini dikarenakan opini publik yang positif akan membentuk citra Polri yang positif pula, yang pada akhirnya dapat berakibat meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Media massa sebagai salah satu pembentuk opini publik sangat berperan dalam proses pembentukan citra. Melalui media massa bisa didesain proses pembentukan opini publik, sehingga hal-hal positif yang sudah dilakukan Polri bisa diketahui masyarakat khususnya pada media *online*. Hal ini karena teknologi berkembang menjadi suatu kebutuhan pokok penting dalam kehidupan masyarakat. Media *online* yang sudah berkembang juga dapat membantu menciptakan citra sehingga efek yang diharapkan adalah munculnya apresiasi masyarakat terhadap Polri.

Mengacu pada fenomena yang digambarkan diatas, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul:

Pengaruh Pemberitaan Media *Online* Terhadap Pembentukan Opini Publik Mengenai Citra Polri (Studi pada *Audience* Media Berita *Online* di Kota Bogor)

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan *audience* media berita *online* terhadap pemberitaan Polri di media *online*?
2. Bagaimana opini *audience* media berita *online* mengenai citra Polri?
3. Bagaimana pengaruh pemberitaan *audience* media berita *online* terhadap pembentukan opini publik mengenai citra Polri?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah jawaban dari perumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tanggapan *audience* media berita *online* di kota Bogor pada pemberitaan Polri di media *online*.
2. Untuk mengetahui seberapa besar opini publik pada *audience* media berita *online* mengenai citra Polri.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberitaan media *online* terhadap pembentukan opini publik mengenai citra Polri.

1.5 Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait dan membutuhkan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah :

- a. Mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga bisa menambah pengetahuan praktis bagi penulis.
- b. Sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini bagi lembaga khususnya Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga khususnya Kepolisian Republik Indonesia untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pencitraan di masyarakat.

- b. Memberikan informasi bagi pihak lembaga mengenai bagaimana opini publik tentang citra Polri.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan.

1. **BAB I PENDAHULUAN**, Pada bab 1 berisi mengenai gambaran objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**, Pada bab II berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini, literatur yang digunakan, kerangka pemikiran dan ruang lingkup penelitian.
3. **BAB III METODE PENELITIAN**, Pada bab III berisi mengenai tahapan penelitian, jenis penelitian, operasionalisasi variabel, skala pengukuran, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik sampling, uji validitas dan reliabilitas, analisis data yang digunakan dalam penelitian.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab IV berisi mengenai hasil dan pembahasan mengenai pembentukan opini publik dilihat dari berbagai aspek, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.
5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, Pada bab V berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan pada objek penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.